

TEK.NODIKA

Jurnal Penelitian Teknologi Pendidikan

Volume 13, Nomor 1, Maret 2015

- Motivasi Berprestasi, Gaya Belajar, dan Kemampuan Memanfaatkan Sumber Belajar Kontribusinya terhadap Kreativitas Mahasiswa D2
Indri Asri Dan Bambang Warsito
- Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran melalui Kegiatan Supervisi Akademik
Sardiyo
- Meningkatkan Kemampuan Guru Matematika dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui Pembimbingan Workshop Kelompok MGMP Sekolah
Endang Retna Wulan
- Peningkatan Motivasi Belajar dan Keterampilan Teknik Pendingin melalui Media Trainer AC bagi Siswa Kelas XII Title SMK Negeri 5 Surakarta
Sukidi
- Revitalisasi Budaya Lokal Kota Kudus dalam Pengembangan Bahan Ajar di Sekolah Dasar
Sri Utaminingsih, Imaniar Purbasari, Nur Fajrie
- Pelatihan Penanaman Budi Pekerti pada Remaja dengan Pendekatan Pendidikan Berbasis Keluarga
Lutfi Wibawa Dan Hiryanto
- Pemanfaatan Media Pembelajaran Trainer PLC untuk Meningkatkan Hasil Belajar Teknik Instalasi Tenaga Listrik
Suwarno
- Penataan dan Pemerataan Guru: Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, dan Kecukupan Guru di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah
Wiwik Wijayanti Dan Mada Sutapa



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

DAFTAR ISI

Motivasi Berprestasi, Gaya Belajar, dan Kemampuan Memanfaatkan Sumber Belajar Kontribusinya terhadap Kreativitas Mahasiswa D2 <i>Indri Asri dan Bambang Warsito</i>	5
Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran melalui Kegiatan Supervisi Akademik <i>Sardiyo</i>	20
Meningkatkan Kemampuan Guru Matematika dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui Pembimbingan Workshop Kelompok MGMP Sekolah <i>Endang Retna Wulan</i>	35
Peningkatan Motivasi Belajar dan Keterampilan Teknik Pendingin melalui Media Trainer AC bagi Siswa Kelas XII Title SMK Negeri 5 Surakarta <i>Sukidi</i>	47
Revitalisasi Budaya Lokal Kota Kudus dalam Pengembangan Bahan Ajar di Sekolah Dasar <i>Sri Utaminingsih¹⁾, Imaniar Purbasari²⁾, Nur Fajrie³⁾</i>	58
Pelatihan Penanaman Budi Pekerti pada Remaja dengan Pendekatan Pendidikan Berbasis Keluarga <i>Lutfi Wibawa dan Hiryanto</i>	64
Pemanfaatan Media Pembelajaran Trainer PLC untuk Meningkatkan Hasil Belajar Teknik Instalasi Tenaga Listrik <i>Suwarno</i>	72
Penataan dan Pemerataan Guru : Analisis Kebutuhan, Ketersediaan, dan Kecukupan Guru di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah <i>Wiwik Wijayanti dan Mada Sutapa</i>	85

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU : ANALISIS KEBUTUHAN, KETERSEDIAAN, DAN KECUKUPAN GURU DI KABUPATEN PURBALINGGA JAWA TENGAH

Wiwik Wijayanti dan Mada Sutapa
wiwikashari@gmail.com>
Dosen Administrasi Pendidikan FIP UNY

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan kabupaten Purbalingga bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan kecukupan guru yang meliputi; 1) guru kelas SD, guru mata pelajaran SD (pendidikan jasmani dan PAI), dan 2) guru SMP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, termasuk jenis penelitian analisis data sekunder (ADS). Data diperoleh dari SIMPK-DAPODIK, kemudian dianalisis dengan menggunakan software yang dikembangkan USAID PRIORITAS berupa pivottable dan pivotchart. Hasil penelitian ini menunjukkan kekurangan guru kelas PNS sebanyak 892 guru, sementara itu masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 176 guru dan guru penjas masih kurang 26 guru. Sedangkan kecukupan guru mata pelajaran (10 mapel) di SMP masih kekurangan 282 guru PNS. Namun jika dengan guru mobail maka kekurangan tersebut menjadi 184 orang guru. Jika ditinjau berdasarkan usia guru maka dapat diketahui total guru SD yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sebanyak 1530 guru (43%). Guru SMP yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sejumlah 222 guru.

Kata Kunci: Penataan dan Pemerataan Guru, Analisis Kebutuhan, Ketersediaan dan Kecukupan Guru

Abstract

This research was conducted at the Department of Education Purbalingga district aims to analyze and describe the adequacy of teachers which include; 1) elementary classroom teachers, subject teachers of elementary school (physical education and PAI), and 2) junior high school teacher. The approach used in this research is quantitative, including the type of secondary data analysis research (ADS). Data obtained from SIMPK-DAPODIK, then analyzed using software developed by USAID PRIORITY PivotTable and PivotChart form.

The results of this study indicate a lack of classroom teachers as much as 892 civil servant teachers, while it was still a shortage of teachers PAI PNS 176 teachers and physical education teachers are still lacking 26 teachers. While the adequacy of subject teachers (10 maple) in junior high school teachers still lack 282 civil servants. But if the teacher mobail then the shortfall to 184 teachers. If the review is based on the age of the teachers it can be seen that the total elementary school teachers will retire in 10 years to come sebanyak 1530 teachers (43%). School teachers who will retire in 10 years to be dating some 222 teachers.

PENDAHULUAN

Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil merupakan respon yang tepat terhadap penataan distribusi guru yang selama ini sulit dilakukan, terutama antarkabupaten dalam provinsi dan distribusi guru antarkabupaten/kota antar provinsi. Melalui peraturan lima menteri ini, memerintahkan kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, serta satuan pendidikan untuk melakukan analisis dan pemetaan guru yang ada di lingkup kebijakan masing-masing.

Analisis pemetaan yang dilakukan selama ini oleh satuan pendidikan dan kabupaten/kota belum mencerminkan analisis yang komprehensif. Kabupaten/kota hanya melakukan analisis agregat dari satuan pendidikan dan analisisnya hanya satu dimensi, sehingga yang tampak adalah berapa sekolah yang kelebihan dan berapa sekolah yang kekurangan guru. Analisis yang sedikit lebih lengkap, seperti tabulasi silang antar dua atau lebih factor belum dilakukan, padahal melalui analisis ini informasi tentang peta guru akan lebih lengkap, terutama untuk penataan distribusi guru yang berkeadilan.

Beberapa masalah dalam distribusi guru diantaranya adalah: 1) kurang berfungsinya pengelolaan sumberdaya pendidik pada tingkat kabupaten/kota; 2) sekolah hanya melaporkan tentang kekurangan guru, jika ada kelebihan guru sekolah tidak melaporkan, 3) tidak ada kebijakan disinsentif bagi sekolah yang kelebihan guru.

Formulasi kebijakan diperlukan dalam rangka implementasi penataan dan pemerataan guru. Formulasi kebijakan yang baik didasarkan pada data yang dianalisis secara cermat. Kebijakan yang diformulasikan dengan tepat akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pendidikan, khususnya penataan dan pemerataan guru. Perencanaan pendidikan yang efisien dan efektif akan mengarahkan penataan dan pemerataan guru di tingkat kabupaten/kota pada sasaran yang tepat. Oleh sebab itu, kebijakan penataan dan pemerataan guru perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan sehingga terjamin penganggarannya. Dengan memanfaatkan data pokok pendidikan (DAPODIK) didapatkan informasi tentang kondisi guru dan dijadikan acuan analisis dalam penataan dan pemerataan guru.

Tujuan kegiatan penataan dan pemerataan guru adalah membangun komitmen, meningkatkan kemampuan, dan kerjasama untuk: 1) pemetaan dan analisis kecukupan

dan kebutuhan guru pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, dan kabupaten/kota; 2) identifikasi alternatif dan; 3) menetapkan kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan kabupaten Purbalingga, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Data yang digunakan berdasarkan data pokok pendidik (DAPODIK) kabupaten Purbalingga. Analisis data menggunakan software yang dikembangkan oleh USAID PRIORITAS dengan menggunakan Microsoft Acces dan Microsoft Excel terutama fitur PivotTable dan PivotChart.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh informasi tentang kecukupan guru, rasio siswa per rombel dan lain-lain yang dapat dijadikan bahan untuk memunculkan isu strategis, apakah kekurangan guru apakah kelebihan guru, atukah banyak sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit. Isu strategis akan ditindaklanjuti dengan pemilihan alternative kebijakan. Terdapat beberapa prinsip dalam pengambilan kebijakan yaitu: 1) Berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, bukan kebutuhan

guru; 2) Peningkatan efektivitas pembelajaran; 3) Mengurangi disparitas mutu pendidikan (dalam kabupaten dan antar kabupaten); dan 4) Peningkatan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendidikan.

Tabel 3. Data Sekolah Dasar yang dianalisis

Komponen	SD Negeri	SD Swasta	Grand Total
Jml Sekolah	461	2	463
Jml Rombel	3243	11	3254
Jml Guru Kelas PNS	2338	0	2338
Jml Guru Kelas Non PNS	844	13	857
Jml Guru PAI PNS	365	0	365
Jml Guru PAI Non PNS	110	1	111
Jml Guru Penjas PNS	330	0	330
Jml Guru Penjas Non PNS	185	0	185

Berdasarkan hasil unduhan data dari Pusat Data DAPODIK dan hasil pendataan tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, teridentifikasi jumlah sekolah dasar di Kabupaten Purbalingga sebanyak 463 sekolah terdiri dari 461 SD Negeri dan 2 SD Swasta. Seluruh data SD Negeri se Kabupaten Purbalingga dapat diolah datanya. Seluruh sekolah dapat diproses datanya karena Dinas Pendidikan belum puas dengan data output dari DAPODIK kemudian melengkapi data dengan mengolah data dari hasil pendataan 2013 yang dilakukan secara rutin oleh dinas pendidikan.

Tabel 4. Data Sekolah Menengah Pertama yang dianalisis

Komponen	Negeri	Swasta	Grand Total
Jml SMP	52	13	58
Jml Rombel SMP	931	78	885
ml Siswa SMP	25449	2019	27468
Jml Guru PNS	1074	22	1096
Jml Guru Non PNS	248	142	390

Berdasarkan hasil unduhan data dari Pusat data DAPODIK, teridentifikasi jumlah SMP di Kabupaten Purbalingga sebanyak 45 sekolah, sekolah yang berhasil mengupload data sebanyak 52 sekolah. Dari 52 sekolah setelah diimport dan di-generate dengan menggunakan SIMPK_DAPODIK output_nya sebanyak 45 sekolah atau sama dengan 87%. Karena prosentase data sekolah masih 87% kemudian Dinas Pendidikan melengkapi data dengan menggunakan hasil pendataan terbaru sehingga jumlah sekolah lengkap menjadi 100%. Karena SMP Satu Atap dan SMP Terbuka masih menginduk kepada sekolah lain maka 5 SMP Satap/Terbuka tidak ikut dianalisis, sehingga jumlah SMP yang datanya dianalisis sebanyak 45 sekolah.

Kecukupan Guru Kelas PNS di SD Negeri

Kecukupan Guru Kelas PNS di SD Negeri dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah guru kelas PNS yang tersedia dikurangi dengan jumlah rombel sebagai kebutuhan guru kelas. Jika angka menunjukkan minus berarti

kekurangan guru kelas. Sebaliknya jika hasilnya menunjukkan angka plus berarti kelebihan guru kelas. Hasil penghitungan kecukupan guru kelas :

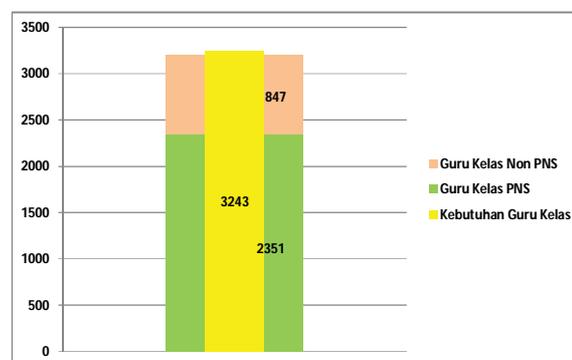
Tabel 5. Kecukupan Guru Kelas PNS per Kecamatan

Kecamatan	Jml Sekolah	Kebutuhan Guru	Jml Guru PNS	Kecukupan Guru	Jml Guru Non PNS
BOBOT-SARI	20	170	106	-64	64
BOJONG-SARI	24	186	146	-40	36
BUKA-TEJA	36	229	174	-55	51
KALIGONDANG	34	217	147	-70	67
KALIMANAHAH	23	158	103	-55	52
KARANG-ANYAR	19	137	101	-36	35
KARANG-JAMBU	13	89	63	-26	18
KARANG-MONCOL	23	174	123	-51	47
KARANG-REJA	23	167	124	-43	38
KEJOBONG	26	177	133	-44	31
KEMANGKON	30	195	137	-58	63
KERTANEGERA	19	125	100	-25	27
KUTASARI	26	186	138	-48	40
MREBET	42	296	208	-88	79
PADAMARA	20	153	102	-51	49
PENGADEGAN	22	149	114	-35	33
PURBALINGGA	26	196	144	-52	54
REMBANG	35	239	182	-57	60
Grand Total	461	3243	2345	-898	844

Berdasarkan tabel 3 : dapat dikemukakan bahwa di 461 SD Negeri yang tersebar di 18 kecamatan terdapat 2345 guru kelas PNS, sedangkan kebutuhan guru kelas sebanyak 3243, sehingga Kabupaten Purbalingga kekurangan guru kelas PNS sebanyak 898 orang.

Kekurangan tersebar di seluruh kecamatan, kecamatan yang paling banyak kekurangannya di Kecamatan Mrebet kurang 88 guru, Kecamatan Kaligondang 70 guru. Kecamatan yang paling sedikit kekurangannya ada di Kecamatan Kertanegara , kekurangan guru kelas PNS sebanyak 25 guru. Dalam

gambar, kecukupan guru kelas PNS Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan seperti grafik di bawah ini :



Grafik 1 : Kecukupan Guru Kelas

Apabila dianalisis lebih lanjut kecukupan guru kelas PNS berdasarkan distribusi kecukupannya, dapat digambarkan pada tabel 4 :

Tabel 6. Distribusi Kecukupan Guru Kelas PNS di SD Negeri

Kecamatan	Kecukupan Guru Kelas									Grand Total
	-8	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	
BOBOTSARI		3	2	1	6	6	2			20
BOJONGSARI					6	7	8	3		24
BUKATEJA				1	3	13	16	3		36
KALIGONDANG		1	1		9	11	10	2		34
KALIMANAH		2		2	4	10	3	2		23
KARANGANYAR				2	5	4	5	3		19
KARANGJAMBU		1	1		2	2	5	2		13
KARANGMONCOL		1		1	7	7	6	1		23
KARANGREJA				2	3	11	4	3		23
KEJOBONG	1			1	1	7	15	1		26
KEMANGKON				1	8	12	6	3		30
KERTANEGARA				1	2	5	6	4	1	19
KUTASARI				2	6	7	8	3		26
MREBET		1	1	5	9	11	9	5	1	42
PADAMARA			1	1	7	10	1			20
PENGADEGAN				1	1	9	10	1		22

Kecamatan	Kecukupan Guru Kelas									Grand Total
	-8	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	
PURBALINGGA				1	8	9	6	2		26
REMBANG				1	4	14	13	3		35
Grand Total	1	9	6	23	91	155	133	41	2	461

Tabel di atas menunjukkan jumlah kecukupan guru kelas di berapa sekolah, misalnya kekurangan 6 guru kelas PNS di 9 sekolah atau kelebihan 1 guru kelas PNS di 2 SD Negeri. Walaupun tidak signifikan

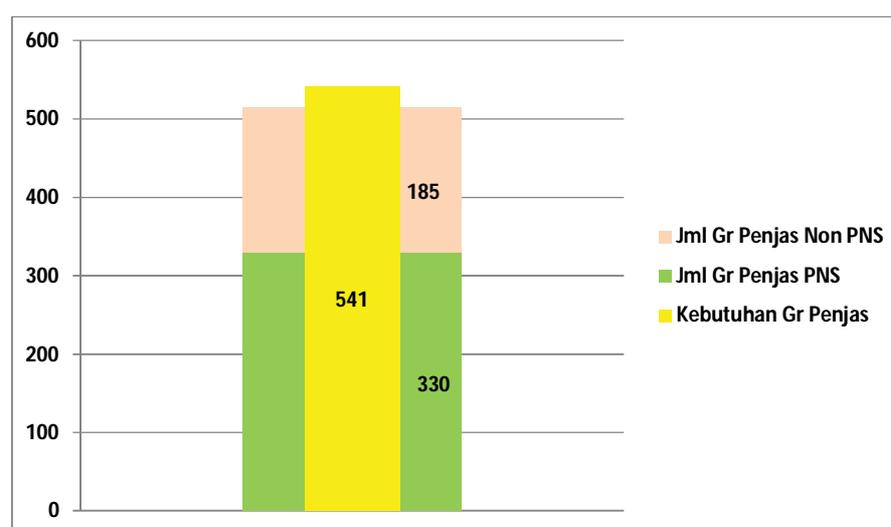
dapat dikemukakan bahwa terdapat distribusi guru kelas PNS yang tidak merata, di hampir semua sekolah kekurangan guru kelas PNS di sisi lain ada beberapa sekolah kelebihan guru kelas PNS.

Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Tabel 7. Kecukupan Guru PNS Mapel Penjaskes di SD Negeri

Kecamatan	Jml SD N	Jml Rombel	Jml Guru PNS	Jml Guru Non PNS	Kebutuhan Guru	Kecukupan Gr PNS
BOBOTSARI	J20	170	13	14	28	-15
BOJONGSARI	24	186	16	12	31	-15
BUKATEJA	36	229	29	8	38	-9
KALIGONDANG	34	217	27	7	36	-9
KALIMANAH	23	158	22	10	26	-4
KARANGANYAR	19	137	11	9	23	-12
KARANGJAMBU	13	89	6	6	15	-9
KARANGMONCOL	23	174	15	13	29	-14
KARANGREJA	23	167	21	4	28	-7
KEJOBONG	26	177	11	14	30	-19
KEMANGKON	30	195	28	12	33	-5
KERTANEGARA	19	125	10	11	21	-11
KUTASARI	26	186	14	11	31	-17
MREBET	42	296	25	24	49	-24
PADAMARA	20	153	18	4	26	-8

Kecamatan	Jml SD N	Jml Rombel	Jml Guru PNS	Jml Guru Non PNS	Kebutuhan Guru	Kecukupan Gr PNS
PENGADEGAN	22	149	16	6	25	-9
PURBALINGGA	26	196	28	4	33	-5
REMBANG	35	239	20	16	40	-20
Grand Total	461	3243	330	185	541	-211



Grafik 2. Kecukupan Guru PNS Mapel Penjaskes di SD Negeri

Hasil penghitungan berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri menunjukkan bahwa kebutuhan guru mata pelajaran Penjaskes di SD Negeri Kabupaten Purbalingga sebanyak 541 guru, sementara tersedia guru Penjaskes

PNS sebanyak 330 guru sehingga kekurangan guru PNS mapel Penjaskes sebanyak 211 guru. Guru Penjaskes Non PNS tersedia 185 guru sehingga secara keseluruhan masih kelebihan guru Penjaskes sebanyak 26 guru.

Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Tabel 9 : Kecukupan Guru PNS Mapel Pendidikan Agama Islam di SD Negeri

Kecamatan	Jml SD Negeri	Jml Rombel	Jml Guru PNS	Jml Guru Non PNS	Kebutuhan Guru	Kecukupan Guru
BOBOTSARI	20	170	23	3	28	-5
BOJONGSARI	24	186	15	7	31	-16
BUKATEJA	36	229	36	1	38	-2

Kecamatan	Jml SD Negeri	Jml Rombel	Jml Guru PNS	Jml Guru Non PNS	Kebutuhan Guru	Kecukupan Guru
KALIGONDANG	34	217	26	1	36	-10
KALIMANAH	23	158	15	9	26	-11
KARANGANYAR	19	137	17	2	23	-6
KARANGJAMBU	13	89	6	6	15	-9
KARANGMONCOL	23	174	20	6	29	-9
KARANGREJA	23	167	16	7	28	-12
KEJOBONG	26	177	28	8	30	-2
KEMANGKON	30	195	32	2	33	-1
KERTANEGARA	19	125	12	8	21	-9
KUTASARI	26	186	19	7	31	-12
MREBET	42	296	25	18	49	-24
PADAMARA	20	153	12	12	26	-14
PENGADEGAN	22	149	17	0	25	-8
PURBALINGGA	26	196	27	3	33	-6
REMBANG	35	239	19	10	40	-21
Grand Total	461	3243	365	110	541	-176



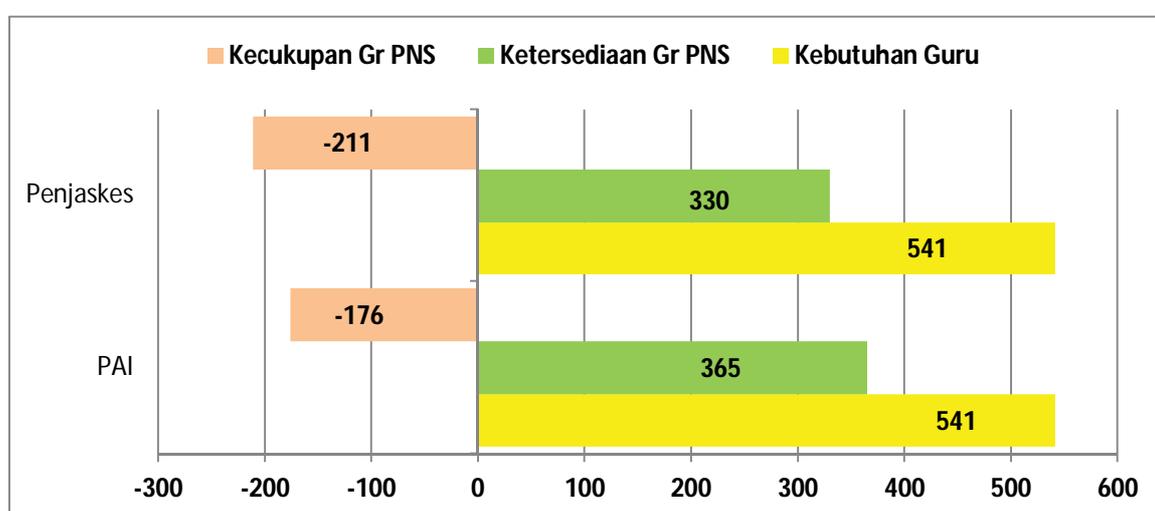
Grafik 5: Kecukupan Guru PNS Mapel PAI di SD Negeri

Berdasarkan tabel dan grafik kecukupan guru mapel PAI di SD Negeri dapat dikemukakan bahwa kebutuhan guru mapel PAI berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri sebanyak 541 guru, sementara tersedia guru PNS Mapel PAI sebanyak 365 guru, sehingga untuk mapel PAI kekurangan guru PNS Mapel

PAI sebanyak 176 guru. Jumlah guru Non PNS mapel PAI sebanyak 110 guru, sehingga total kekurangan guru mapel PAI di SD Negeri sebanyak 66 guru.

Hasil penghitungan guru mapel di SD Negeri dengan hanya memperhitungkan status PNS hasilnya sebagai berikut.

Grafik 6 : Kecukupan Guru Mapel Penjaskes dan PAI di SD Negeri



Rasio Siswa Rombel

Rasio Siswa Rombel menggambarkan besaran jumlah siswa per rombel. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyatakan bahwa rasio siswa rombel di SD maksimal 32 siswa per rombel. Rasio siswa rombel SD di Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan pada table nomor :

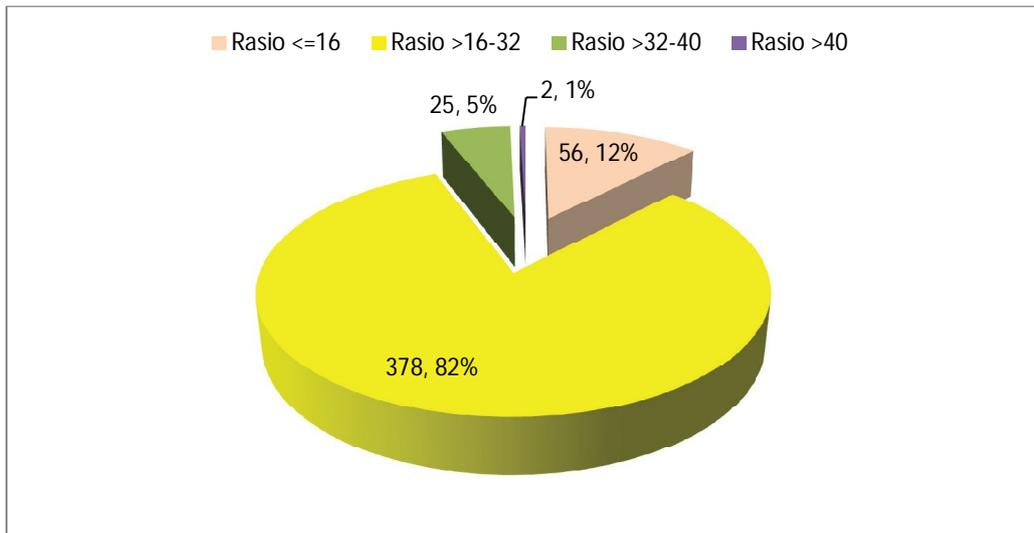
Tabel 7 : Rasio siswa Rombel

Rasio Siswa Rombel	Jml Sekolah	Persen
Rasio <=16	56	12%
Rasio >16-32	378	82%
Rasio >32-40	25	5%
Rasio >40	2	0%
Grand Total	461	100%

Sekolah yang memenuhi SPM Rasio siswa rombel sebanyak 94% atau sama dengan 434 SD, dan hanya 6% atau 27 sekolah yang belum memenuhi SPM. Jika diperhatikan lebih jauh 434 SD yang memenuhi SPM, ada 56 SD

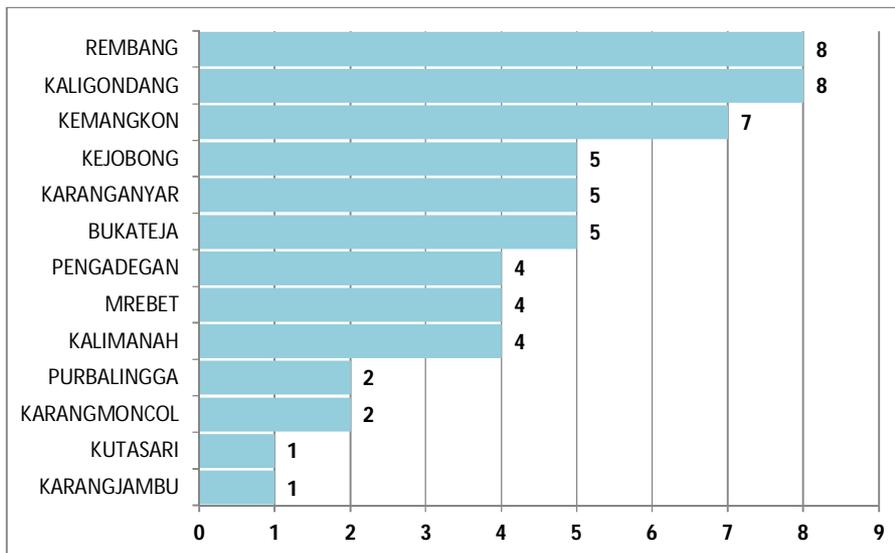
Negeri atau 12% yang rasio siswa rombelnya sangat kecil yaitu ≤ 16 atau setengahnya SPM. Dengan grafik SD Negeri dengan rasio siswa Rombel ≤ 16 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 7 : Rasio Siswa Rombel SD Negeri



Distribusi SD Negeri dengan rasio siswa rombel ≤ 16 (sekolah kecil) dapat digambarkan di dalam grafik nomor :

Grafik 8 : Distribusi Sekolah Kecil di SD Negeri per Kecamatan



Berdasarkan grafik nomor 5 akan dapat untuk digabung dengan sekolah dasar yang dilacak sekolah-sekolah kecil yang berpotensi lain.

Kecukupan Guru Kelas di SD kecil

Tabel 8 : Kecukupan guru kelas di SD Kecil

Kecamatan	Jml Sekolah	Kebutuhan Gr	Jml Guru PNS	Kecukupan Guru PNS	Jml Guru Non PNS
BUKATEJA	5	30	21	-9	7
KALIGONDANG	8	48	29	-19	15
KALIMANAH	4	24	16	-8	6
KARANGANYAR	5	30	20	-10	9
KARANGJAMBU	1	6	5	-1	1
KARANGMONCOL	2	12	9	-3	1
KEJOBONG	5	30	22	-8	6
KEMANGKON	7	42	30	-12	13
KUTASARI	1	6	3	-3	2
MREBET	4	24	15	-9	7
PENGADEGAN	4	24	19	-5	3
PURBALINGGA	2	12	6	-6	6
REMBANG	8	48	35	-13	14
Grand Total	56	336	230	-106	90

Hasil penghitungan menunjukkan di 56 SD Kecil kebutuhan guru kelas sebanyak 336 guru, sementara tersedia 230 guru kelas PNS sehingga kekurangan guru kelas PNS di SD Kecil sebanyak 106 guru. Di sisi lain tersedia guru kelas non PNS sebanyak 90 guru, sehingga total di SD Kecil kekurangan guru kelas sebanyak 16 guru.

Kecukupan Guru Mata Pelajaran PNS di SMP Negeri Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan guru mapel per sekolah dibandingkan dengan jumlah guru mapel yang tersedia di sekolah maka kecukupan guru mapel di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai dalam tabel berikut :

Tabel 13 : Kecukupan Guru Mata Pelajaran PNS di SMP Negeri

Mata Pelajaran	Jml SMP Negeri	Jml Rombel	Jml Guru PNS	Kebutuhan Guru	Kecukupan Guru PNS	Jml Guru Non PNS
Bhs. Indonesia	52	931	130	165	-35	29
Bhs. Inggris	51	907	107	161	-54	56
IPA	52	931	146	165	-19	28
IPS	52	931	156	165	-9	10
Matematika	52	931	137	165	-28	38
PAI	51	921	60	88	-28	19
Penjasorkes	52	931	60	89	-29	22
PKn	50	913	77	87	-10	6
Seni Budaya	52	931	64	89	-25	18
TIK	47	833	35	80	-45	27
Grand Total	511	9160	972	1254	-282	253

Perhitungan Kecukupan Guru Mapel di SMP Negeri dengan Model Guru Mobilitas

Perhitungan kecukupan guru dengan model guru mobilitas (kecukupan guru mata pelajaran tingkat kabupaten), artinya untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam pelajaran guru diperbolehkan mengajar di lebih dari 1 (satu) sekolah. Untuk menghitung kebutuhan guru tingkat kabupaten cukup dibutuhkan data

jumlah rombel se kabupaten dikalikan jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan jumlah jam pada struktur program di dalam kurikulum kemudian di bagi 24 (dua puluh empat) kewajiban mengajar guru.

Dengan model guru mobilitas maka kebutuhan guru akan lebih efisien. Perhitungan kecukupan guru dengan model guru mobilitas dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

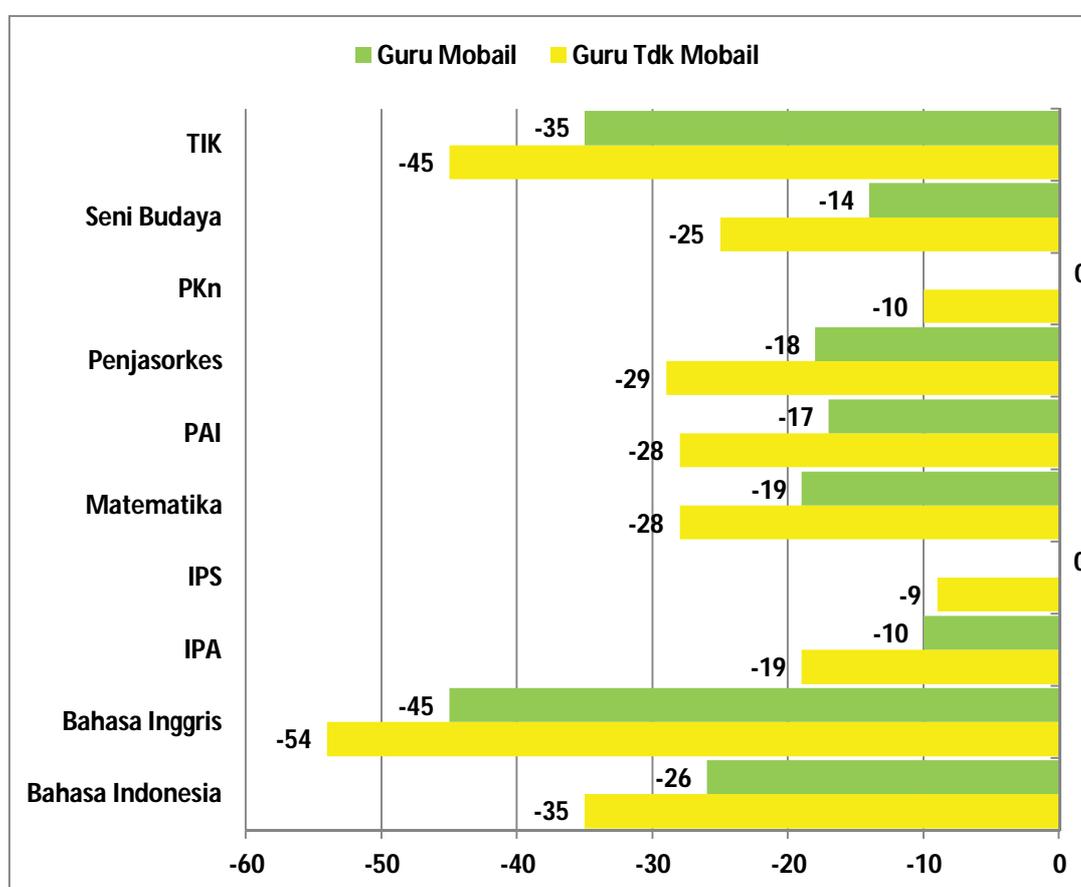
Tabel 14 : Kecukupan Guru Mapel PNS di SMP Negeri dengan Model Guru Mobilitas

Mata Pelajaran	Jml SMP Negeri	Jml Rombel	Kebutuhan Guru	Jml Guru PNS	Kecukupan Guru PNS	Jml Guru Non PNS
Bhs. Indonesia	52	931	156	130	-26	29
Bhs. Inggris	51	907	152	107	-45	56
IPA	52	931	156	146	-10	28

Mata Pelajaran	Jml SMP Negeri	Jml Rombel	Kebutuhan Guru	Jml Guru PNS	Kecukupan Guru PNS	Jml Guru Non PNS
IPS	52	931	156	156	0	10
Matematika	52	931	156	137	-19	38
PAI	51	921	77	60	-17	19
Penjasorkes	52	931	78	60	-18	22
PKn	50	913	77	77	0	6
Seni Budaya	52	931	78	64	-14	18
TIK	47	833	70	35	-35	27
Grand Total	511	9160	1156	972	-184	253

Penghitungan kecukupan guru mobail dan tidak mobail jika hasilnya kita sandingkan, maka grafiknya sebagai berikut :

Grafik 19 : Perbandingan Kecukupan Guru Mapel PNS di SMP Negeri dengan Model Mobilitas dan Tidak Mobilitas



Perbandingan kedua model penghitungan kecukupan guru mapel PNS di atas dapat dikemukakan : Kecukupan guru Mapel Bahasa Indonesia apabila dihitung per sekolah kekurangan guru 35 guru tetapi dihitung dengan guru mobilitas kekurangannya tinggal 26 guru mapel PNS. Kecukupan guru mapel Bahasa Inggris apabila dihitung per sekolah kekurangan guru 54 orang tetapi apabila dihitung dengan model mobilitas kekurangannya tinggal 45 guru. Kecukupan guru PNS mapel IPS, dengan model penghitungan per sekolah kurang 9 guru, sementara dengan model mobilitas kecukupan guru PNS mapel IPS menjadi 0 guru.

Guru Mapel IPA pada mulanya kekurangan 19 guru, dengan model mobilitas kekurangannya tinggal 10 guru. Guru Mapel Matematika kekurangan 28 orang dengan model guru mobilitas menjadi kekurangannya tinggal 19 guru. PAI kekurangan 28 guru menjadi kekurangannya tinggal 17 guru, Penjaskes kekurangan 18 guru menjadi kekurangannya menjadi 10 guru. Mapel PKn kekurangan 10 guru menjadi kekurangannya menjadi 0 guru, Seni Budaya kekurangan 25 guru menjadi kekurangannya tinggal 14 guru, sementara TIK kekurangan 45 guru menjadi kekurangan 35 guru.

Apabila kedua model penghitungan kecukupan guru dibandingkan total kecukupannya, dengan model penghitungan

kecukupan guru sekolah per sekolah total kekurangan guru PNS sebanyak 282 guru PNS. Tetapi apabila dihitung kecukupannya di tingkat kabupaten atau dengan model mobilitas, total kekurangan guru PNS sebanyak 184 guru.

Hasil penghitungan kecukupan guru dengan model mobilitas kebutuhan guru lebih kecil dibandingkan dengan model penghitungan kecukupan guru sekolah per sekolah. Dengan model mobilitas kekurangan guru mapel PNS di Kabupaten Purbalingga sebanyak 184 guru. Dengan penghitungan kecukupan guru PNS sekolah per sekolah terjadi kekurangan guru sebanyak 282 guru. Artinya, dengan kebijakan mobilitas kecukupan guru mapel yang bisa dihemat sebanyak 98 guru. Jika seorang guru IIIa digaji 2,5 juta per bulan, maka efisiensi yang bisa dihemat $98 \times 13 \times 2,5 \text{ jt} = 3,185,000,000$, setiap tahun.

Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Guru Kelas di SD Negeri

Kebutuhan guru kelas PNS di SD Negeri sebanyak 3243 guru, ketersediaan guru kelas PNS di SD Negeri sebanyak 2351 sehingga kekurangan guru kelas PNS

sebanyak 892 guru. Sementara tersedia guru kelas non PNS di SD Negeri sebanyak 847 guru, jumlah guru kelas PNS dan non PNS di SD Negeri sebanyak 3198 guru, dengan demikian masih kekurangan 45 guru kelas di SD Negeri. Sementara itu Kepala Sekolah yang merangkap sebagai guru kelas sebanyak 432 orang.

2. Guru PNS PAI di SD Negeri

Kebutuhan guru PNS mapel PAI di SD Negeri sebanyak 541 guru, ketersediaan guru PNS PAI sebanyak 365, sehingga masih kekurangan guru PNS PAI sebanyak 176 guru. Ketersediaan guru non PNS mapel PAI di SD Negeri sebanyak 110 guru, secara keseluruhan guru PAI di SD Negeri kekurangan sebanyak 66 guru. Sementara itu, Kepala Sekolah yang mengajarkan mapel PAI sebanyak 14 orang.

3. Guru Penjas di SD Negeri

Berdasarkan perhitungan, kebutuhan guru Penjas di SD Negeri sebanyak 541 guru, sementara tersedia guru PNS Penjas sebanyak 330 guru sehingga kekurangan guru Penjas PNS sebanyak 211 guru. Jumlah guru Penjaskes Non PNS di SD Negeri sebanyak 185 guru, jumlah guru Penjaskes PNS dan Non PNS sebanyak 515 guru. Secara keseluruhan guru Penjaskes di SD Negeri masih kurang 26 orang.

Sementara itu, ada 15 Kepala Sekolah yang mengajarkan mapel Penjaskes.

4. Sekolah Kecil di SD Negeri

Berdasarkan perhitungan rasio siswa rombel 434 SD Negeri (94%) memenuhi SPM RSR dan hanya 6 % yg belum memenuhi SPM. Hasil penghitungan juga menunjukkan 56 SDN (12%) memiliki RSR ≤ 16 (sekolah kecil). Dari 56 sekolah kebutuhan guru kelas 336 guru, tersedia guru kelas PNS 230 guru, sehingga guru kelas PNS kurang sebanyak 106 guru. Di 56 sekolah kecil tersedia 90 guru kelas non PNS, secara keseluruhan guru kelas di SD Kecil kurang 16 guru.

5. Perkiraan Pensiun guru PNS di SDN

Dalam waktu 10 tahun, Guru kelas yang akan pensiun sebanyak 1080 guru (38%), guru PAI 338 guru (91%), dan guru Penjas 112 guru (34%) sehingga total guru yang akan pensiun dalam 10 tahun yang akan datang sebanyak 1530 guru (43%).

6. Guru SMP kekurangan 282 guru, namun jika dengan guru mobail masih kekurangan 184 guru.

B. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Agar penataan dan pemerataan guru lebih efektif dan efisien beberapa hal berikut direkomendasikan:

1. Penggabungan sekolah kecil dan sekolah satu halaman agar pengelolaan sekolah dapat lebih efisien dan beban perawatan sekolah/madrasah dapat dikurangi secara signifikan.
2. Penerapan pembelajaran kelas rangkap (multigrade teaching) untuk sekolah kecil yang tidak dapat digabung.
3. Pengaturan/penyebaran guru yang telah berkualifikasi S1/D4 agar sekolah/madrasah yang belum memiliki guru S1/D4 dapat memenuhi SPM.
4. Pengaturan pengangkatan GTT agar guru yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dari segi jumlah dan kualifikasi.
5. Peningkatan kesejahteraan guru wiyata bhakti melalui APBD kabupaten untuk guru wiyata bhakti yang benar-benar diperlukan sekolah.
6. Mengusulkan rekrutmen CPNS guru kelas dan guru mapel untuk mengganti guru yang pensiun dan kekurangan guru.

Daftar Pustaka

- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kabupaten Purbalingga, (2013), Data Pokok Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Peraturan Bersama 5 Menteri, (2011), tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- Sugiyono, (2010), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2012), Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta.
- USAID Prioritas, (2012), Training of Trainer Penataan dan Pemerataan Guru. Semarang: USAID Prioritas Jawa Tengah.
- Widodo, D. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.